



# **KONSEP RENCANA KONTINJENSI BENCANA (PENGANTAR)**

**Medi Herlianto**  
**Widyaiswara Ahli Utama, BNPB**

# MATERI

1. PENDAHULUAN
2. POSISI RENKON DALAM PB
3. PRINSIP RENKON
4. PROSES PENYUSUNAN &  
AKTIVASI RENKON
5. TANTANGAN

## RAKORNAS PB 2019

### 6 Arahan Presiden JOKOWIDODO

1. Perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
2. Pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara masif untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi, dan mengurangi dampak bencana, serta sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitiannya.
3. Gubernur akan secara otomatis menjadi komandan satgas darurat pada saat kejadian bencana, serta Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas.
4. Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasis rekomendasi dari pakar dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.
5. Edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutama di daerah rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama.
6. Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan.



## RAKORNAS PB 2020



### ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Rakornas Penanggulangan Bencana 2020  
SICC-Bogor, 4 Februari 2020

- Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, berkolaborasi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.
- Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun Rencana Kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan
- Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, "Pentahelix" yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana.
- Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum



BNPB\_Indonesia @InfoBencanaBNPB @BNPB\_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id

# PERMASALAHAN & UPAYA

## MASALAH

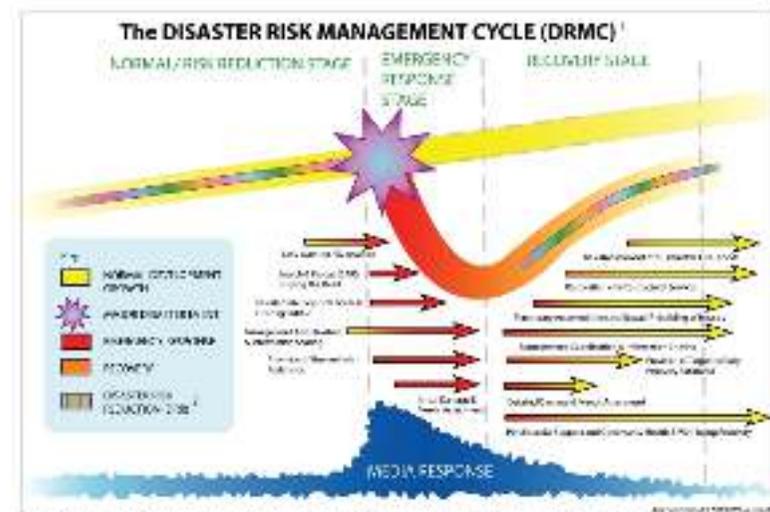
- Business as usual
- Complicated
- Multi-Dimensional
- Unpredictable/Uncertainty
- Networking/Strategic partnership
- .....

## UPAYA

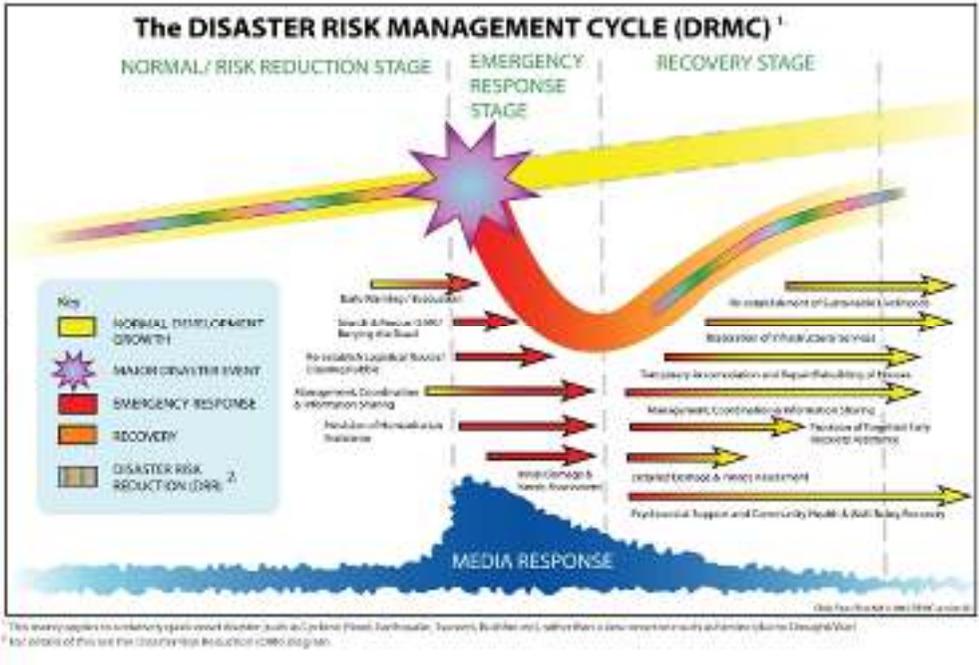
- ✓ Unknow risk and phenomena, planning, limited research-policy, ,capacity development as well
- ✓ Lack of Coordination/Partial efforts
- ✓ DRM system is not running well
- ✓ Project based management/ responsive / sporadic
- ✓ .....

## PEMICU BENCANA

1. Increasing population;
2. Urbanization;
3. Environmental degradation;
4. Poverty; and
5. Influence of global climate change
6. ....



# Manajemen Bencana

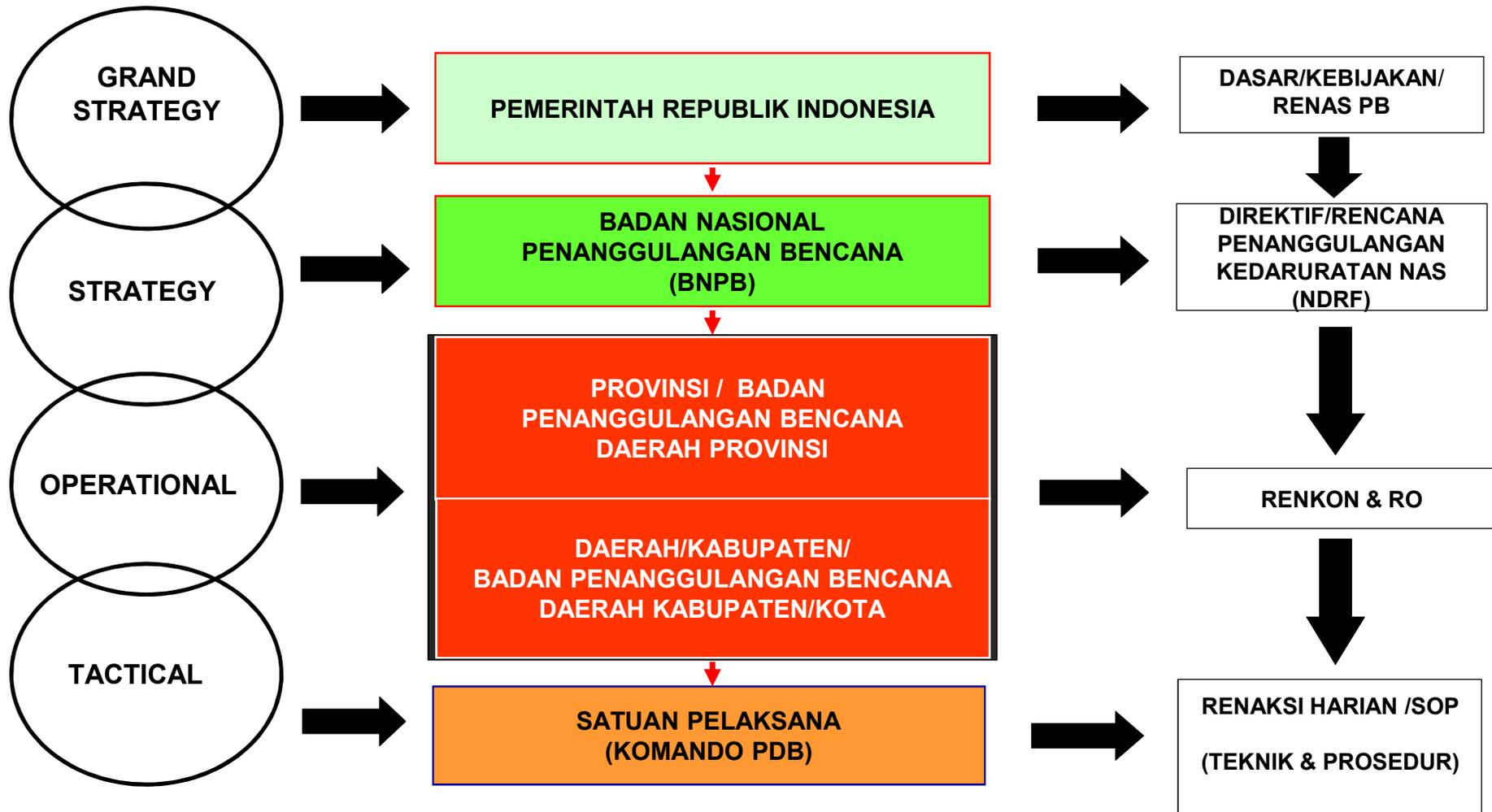


# Manajemen Penanganan Darurat

**TATARAN/STRATA  
(LEVEL)**

**OTORITAS**

**PRODUK**



## KONTINGENSI (Contingency )

Suatu keadaan atau situasi yg **diperkirakan** akan segera **terjadi**, tetapi **mungkin juga tidak akan terjadi**

## RENCANA KONTINGENSI

Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada suatu keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut.

**Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.**

# Definisi Perencanaan Kontingensi

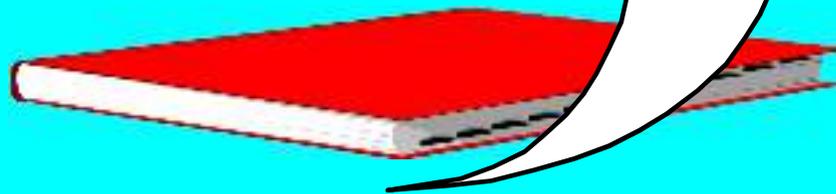
Perencanaan Kontingensi adalah **alat manajemen** yg digunakan untuk **menganalisa dampak potensi krisis**, agar dapat mengatur langkah lebih awal yg tepat untuk menghadapi secara tepat waktu, efektif dan sesuai yg dibutuhkan oleh masyarakat yg terdampak.

Perencanaan Kontingensi adalah **alat untuk mengantisipasi dan memecahkan masalah** yg khas timbul selama tanggap kemanusiaan

# *Rencana Kontingensi*

“suatu perencanaan kedepan pada keadaan/situasi yang tidak menentu, dengan

- skenario dan tujuan yang **disepakati**;
- tindakan manajerial dan teknis **ditetapkan**;
- sistem penanggulangan **ditentukan** untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana & kedaruratan.”





# Posisi Dalam Tahapan PB

# Penanggulangan Bencana

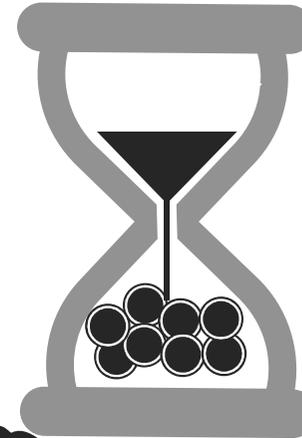
## ACAMAN

**Keadaan berpotensi merusak**

Alam, kegiatan manusia, sosial, pandemi, teknologi, dsb

## BAHAYA

**Ketika ancaman sungguh terjadi**



## KEDARURATAN

**Kegentingan akibat kejadian bencana**

*Menyelamatkan, memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi, menyiapkan pemulihan*

**KEMAMPUAN KETANGGUHAN**

## KETERPAPARAN

**Irisan bahaya dan kerentanan**

## KERENTANAN

**Keadaan atau ciri-ciri yang membuat rawan**

Sosial ekonomis, geologis, meteorologis, dsb.

## MENGELOLA RISIKO

*Tidak membuat risiko baru, tidak memperburuk dan terus mengurangi risiko yang ada*

## MANAJEMEN RISIKO

KAJIAN RISIKO

PRB STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL

PENGELOLAAN SISA RISIKO

KESIAPAN

## MANAJEMEN KEDARURATAN

KESIAGAAN

TANGGAP DARURAT

## MEMBANGUN KEMBALI

*Mengembalikan fungsi, membangun kembali, berinvestasi untuk ketangguhan kedepan*

## MANAJEMEN PEMULIHAN

PEMULIHAN YANG LEBIH BAIK



“Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, dicek terus, bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan kecepatan respons yang harus terus-menerus ditingkatkan. Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Dan sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban.”

“...memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan, mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga. Melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.”

# ARAHAN PRESIDEN DALAM RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021

- Hal yang paling utama adalah pelaksanaan di lapangan bukan hanya membuat aturan.
- Kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir.
- Penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta peringatan dini dilakukan secara cepat dan akurat.
- Edukasi dan literasi kebencanaan terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga.

Rabu, 3 Maret 2021  
Istana Merdeka, Jakarta



**Joko Widodo**  
Presiden Republik Indonesia



# RENKON: Pelayanan Dasar

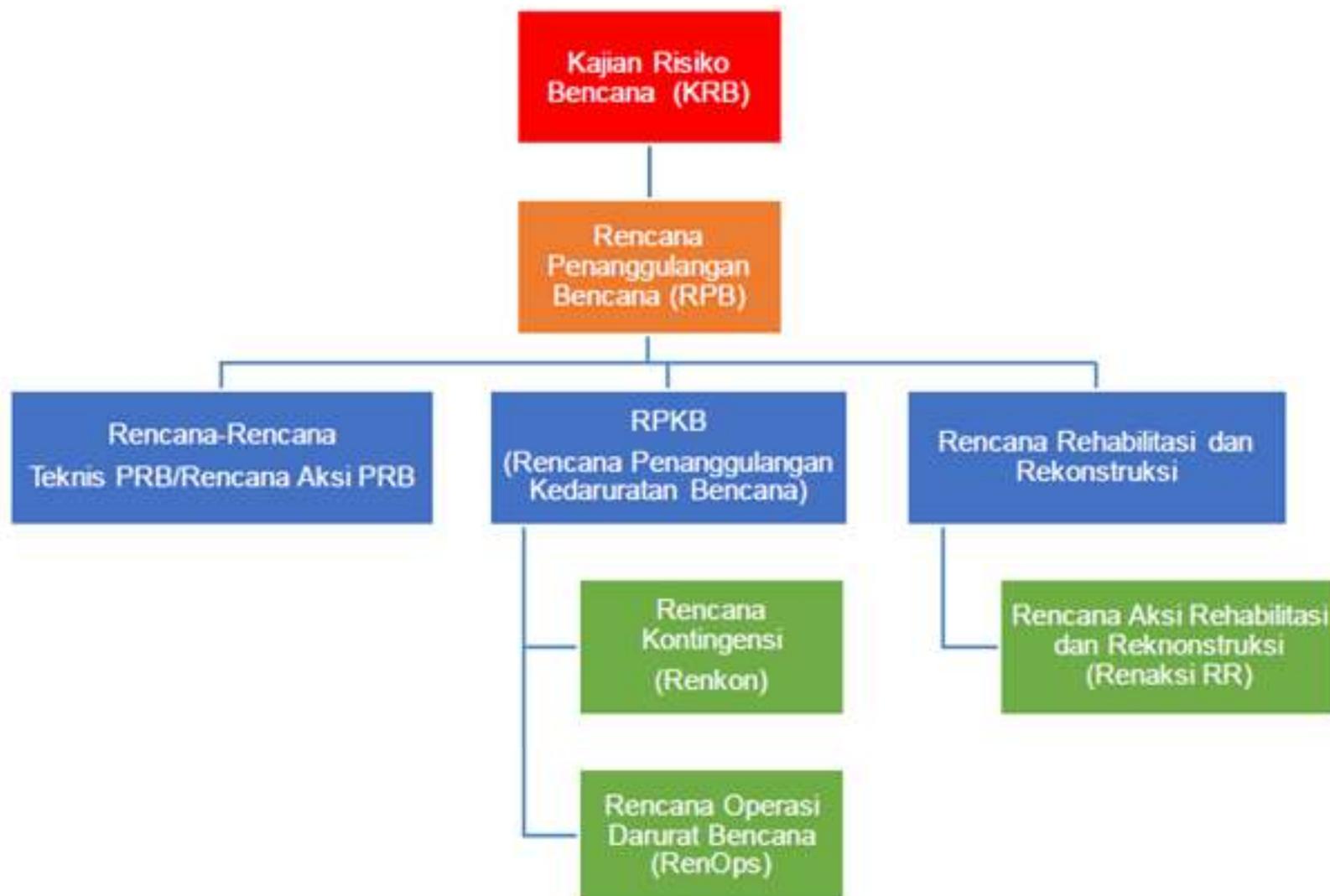
Penanggulangan Bencana adalah urusan pemerintahan KONKUREN, yang sifatnya WAJIB, dan merupakan Sub--urusan dari Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Penyusunan Rencana Kontinjensi merupakan bagian dari PELAYANAN DASAR pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pengawasan dan pembinaan: Teknis administratif oleh KEMENDAGRI, dan teknis Operasional oleh BNPB (UU 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah)

## Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana:

WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA DAN YANG MENJADI KORBAN BENCANA.  
(Pasal 9 ayat (3) NPPR No. 2 Tahun 2008 tentang SPPT)

Jenis Pelayanan	Mutu	Kegiatan
INFORMASI RAWAN BENCANA	JUMLAH DAN KUALITAS ASET DAN JUKNIS PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RENCANA RANAH BENCANA</li> <li>2. BENTUK, WILAYAH, KAWASAN, dan KAWASAN BERBAHAYA</li> </ol>
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RPB: RENKON</li> <li>2. Pelatihan pencegahan mitigasi</li> <li>3. Pelatihan aparat: Warga Negara</li> <li>4. Glas: Kesiapsiagaan</li> <li>5. DalOps dan sarpras kesiapsiagaan</li> <li>6. Berjalan, pemantauan dan kesiapsiagaan</li> </ol>
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana evakuasi korban terdampak</li> <li>2. Penyusunan rencana evakuasi korban</li> <li>3. Penyusunan rencana evakuasi korban</li> <li>4. Penyusunan rencana evakuasi korban</li> </ol>



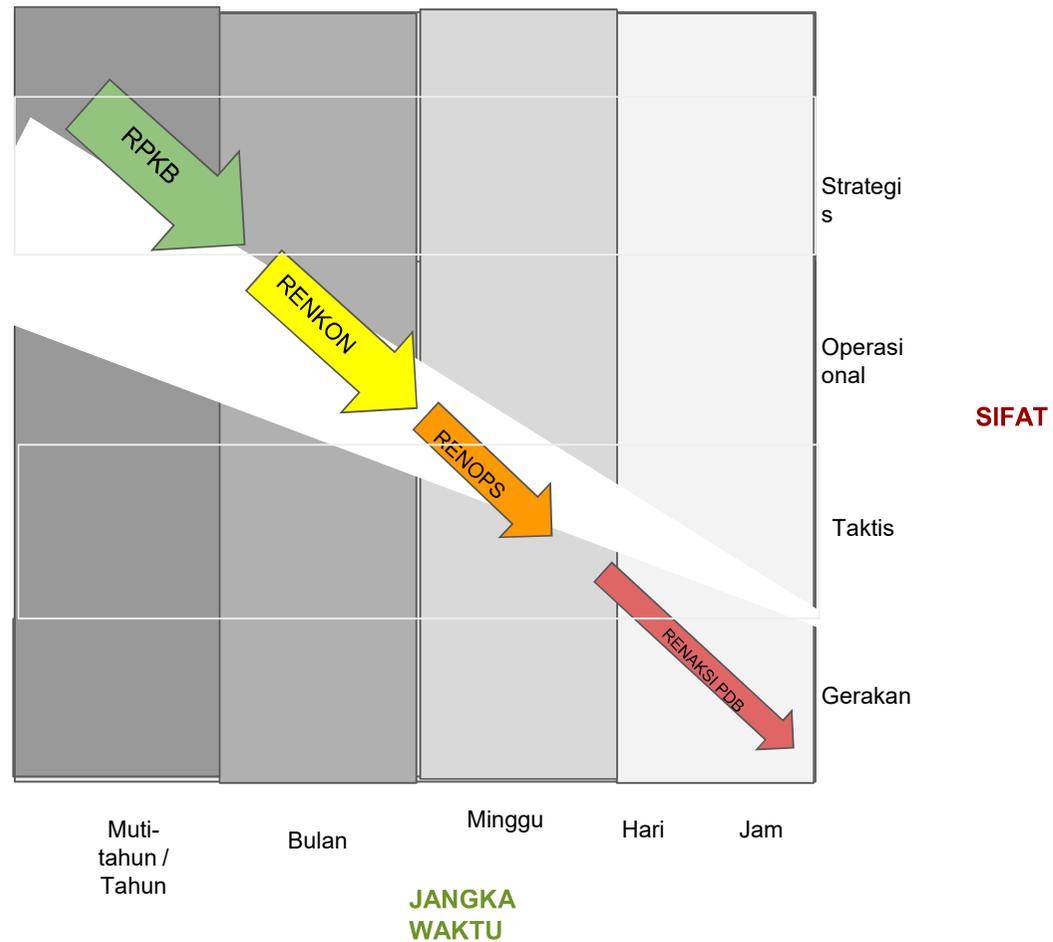
# Hierarkhi Perencanaan Kedaruratan

**Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB)**  
 UU Ps 45 (2) a, PP Ps. 17  
 Rencana umum untuk semua ancaman

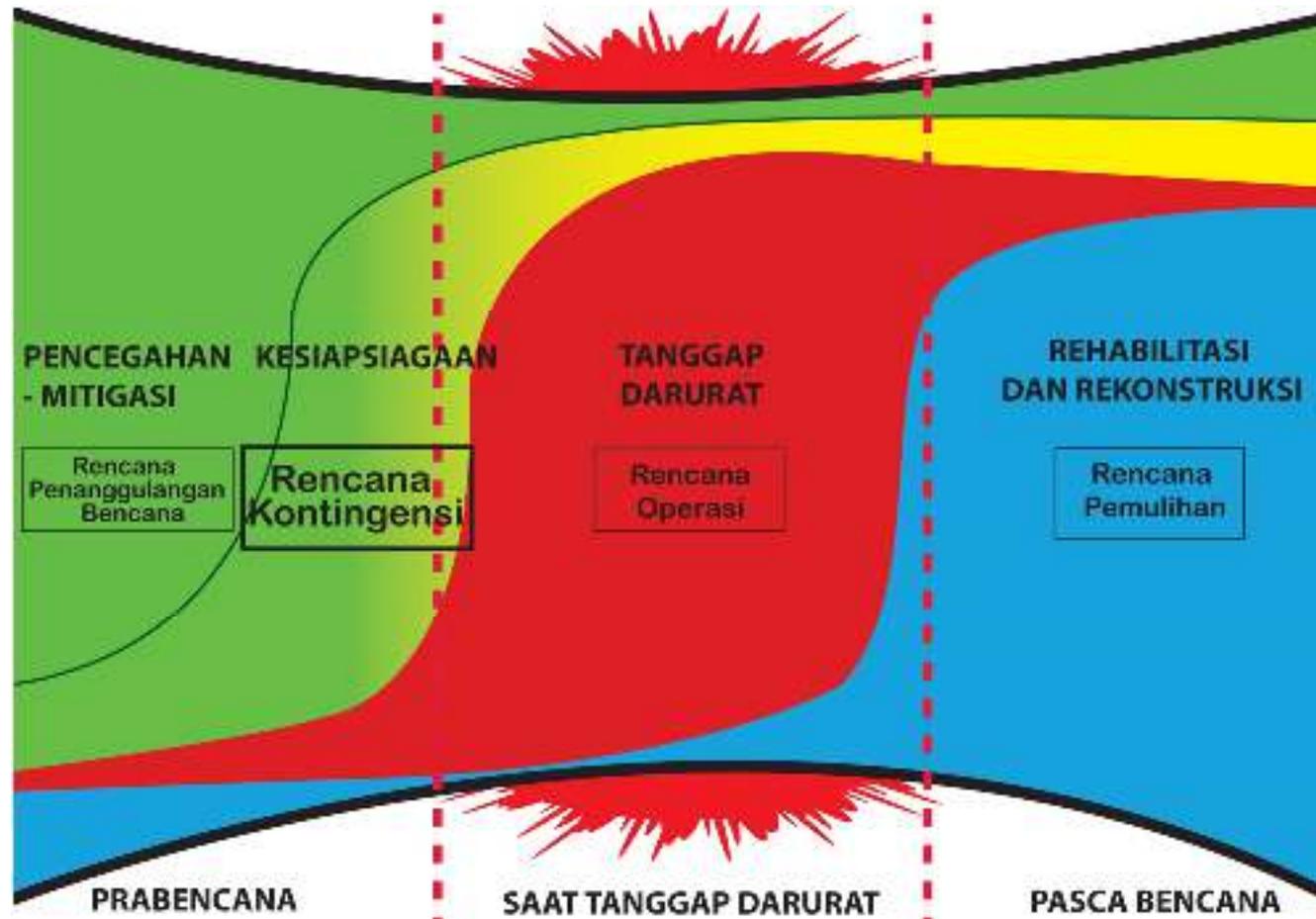
**Rencana kontingensi (PP Ps. 17.3)**  
 Rencana tanggapan terhadap ancaman (ancaman-ancaman) tertentu

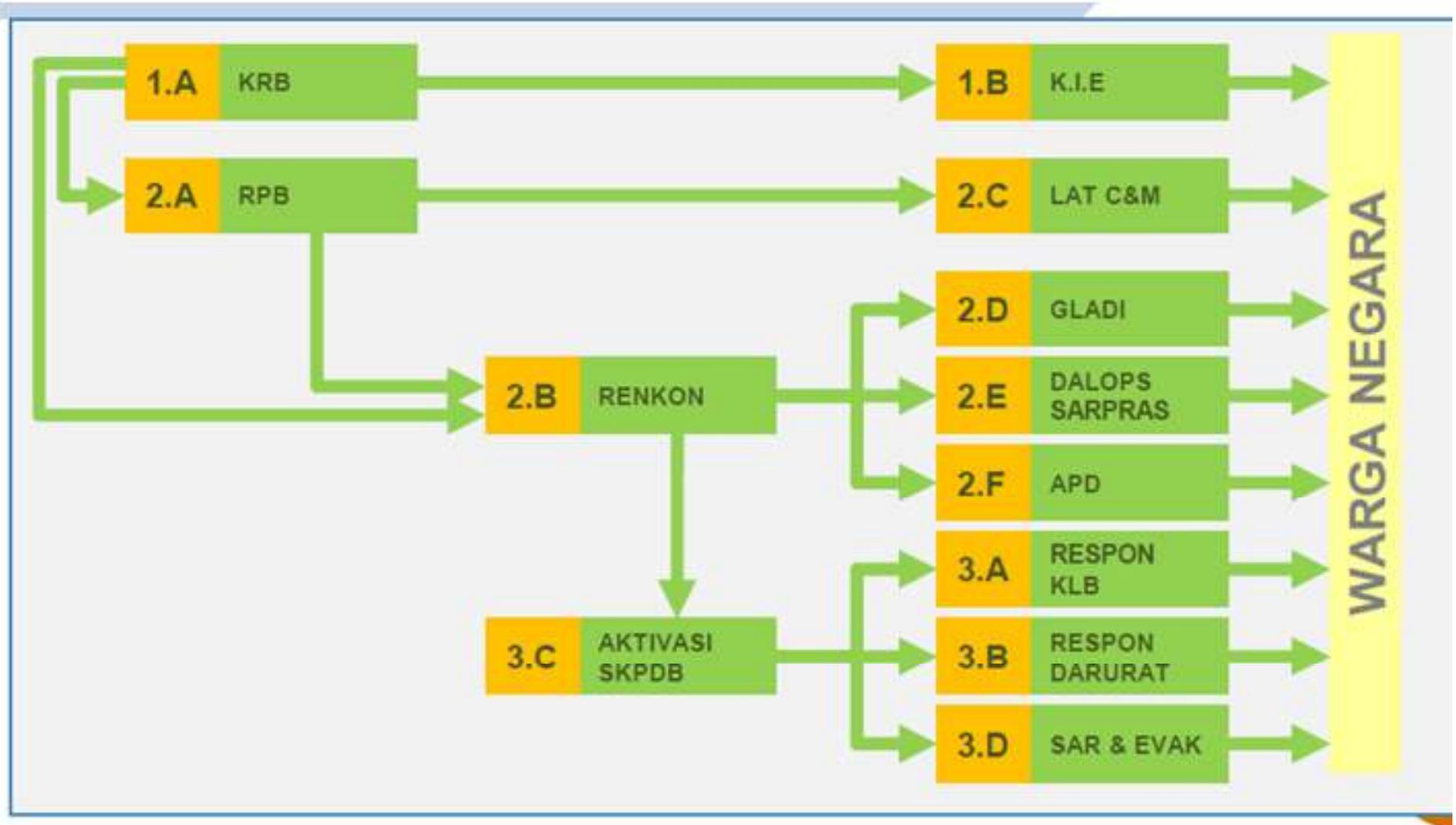
**Rencana Operasi (PP Ps. 50)**  
 Perintah pelaksanaan dari Komandan pada saat darurat

**Rencana Aksi PDB**



# Rencana dalam Penanggulangan Bencana





# KOMPONEN KESIAPSIAGAAN

UU No. 24/2007 Pasal 45

PP No. 21/2008 Pasal 16

Kesiapsiagaan

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

KOMPONEN  
KESIAPSIAGAAN

1. PERENCANAAN (termasuk identifikasi dan kajian risiko)

2. SISTEM PERINGATAN DINI

3. SISTEM MANAJEMEN/PENGELOLAAN SUMBER DAYA

4. SISTEM MANAJEMEN/TANGGAP DARURAT BENCANA

5. MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

6. PELATIHAN, LATIHAN, DAN UJI

7. PENYIAPAN LOKASI EVAKUASI

REGULASI

KERANGKA

# Rencana Penanggulangan Bencana

UU Ps. 38; PP Ps . 6

Lima tahunan seperti RPJMN, ditinjau tiap 2 tahun

## Renaksi PRB

PP Ps. 8 (bagian dari perencanaan berkala pembangunan biasa )

## Renaksi Rehab Rekons

PP Ps. 57 melibatkan pentahapan rehab-rekons



RENCANA

RPKB

UU Ps 45 (2) a, PP  
Ps. 17

KONTINJENSI

(PP Ps. 17.3)

OPERASI

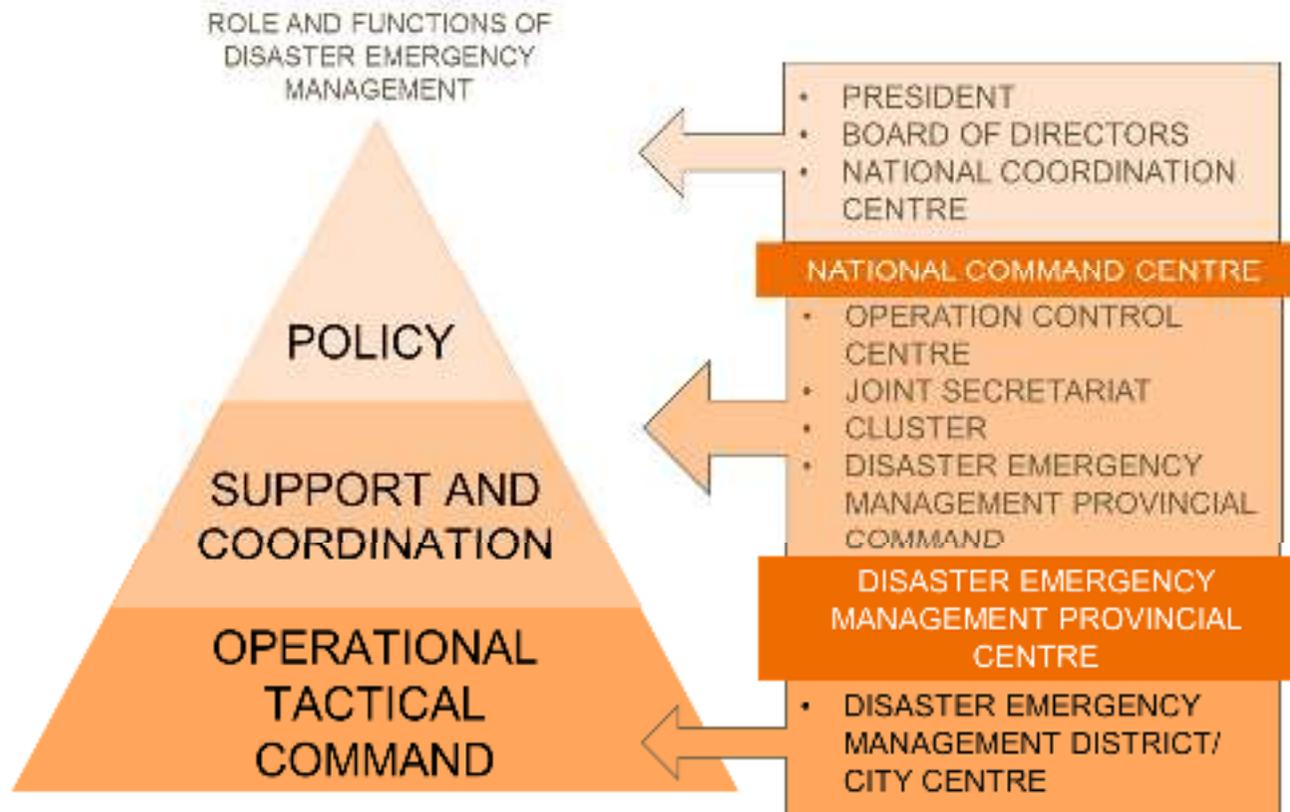
PP PS. 50

HARIAN

# RPKB/NDRF

Mandate for BNPB and BPBD/LDMO functions as **coordinator, command and executor in disaster management.**

DM in local level – **Local Disaster Management Office/ BPBD**



**UU-PB**

**Koordinasi**

**Komando**

**Pelaksana**

Koordinasi PDB

Komando PDB

Pelaksana PDB

**RPKB/NDRF**

**SKPDB/NIMS**

SKPDB Kab/Kota

SKPDB Provinsi

SKPDB Nasional

ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS	RENAKSI PDB
Kapan	Keadaan <b>normal</b>	Ada <b>indikasi ancaman</b> atau bahaya	Pada saat ditetapkan <b>status darurat</b>	Pada saat <b>tanggap darurat</b>
Cakupan	Semua ancaman, umum	Satu ancaman tertentu	Ancaman yang telah menjadi bencana	Aspek khusus dari kejadian kedaruratan
Pelibatan	Semua pihak yang <b>dapat</b> terlibat	Pihak yang <b>diperkirakan</b> akan terlibat	Pihak yang <b>diperlukan</b> untuk terlibat	Pelaku / unit tertentu dan pihak-pihak yang <b>harus melaksanakan</b> tugas
Durasi	Jangka panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan	Sesuai perintah,
Sifat	Perkiraan	Terukur	Spesifik / Tertentu	Rinci , Terbatas
Muatan	Kerangka normatif	Kerangka kerja	Rencana gerak	Perintah gerak
Tataran	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komandan operasi	Pelaksana Tugas



# Prinsip-Prinsip Rencana Kontijensi

# Prinsip-Prinsip

**01 DISUSUN BERSAMA**  
Berbagai parapihak yang diperkirakan  
sungguh akan terlibat dalam tanggap darurat

**02 BERBASIS SKENARIO**  
Ancaman sudah ditemukanali sebagai suatu  
potensi kejadian yang berbahaya pada suatu  
wilayah dan waktu tertentu

**03 SATU ANCAMAN**  
Mempersiapkan tanggapan terhadap satu  
ancaman tertentu, dapat beserta bahaya  
ikutanya.

**04 PERSETUJUAN**  
Melibatkan kesepakatan atas skenario, tujuan  
dan strategi serta kegiatan kunci tanggap  
darurat yang menjadi obyek Renkon



**05 TERBUKA**  
Dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif  
guna mendapatkan kejelasan dan komitmen  
dalam tanggap bencana

**06 PEMBAGIAN TUGAS**  
Tugas tanggapan darurat dibagi habis  
diantara parapihak, termasuk pihak-pihak  
yang tidak hadir dalam proses perencanaan

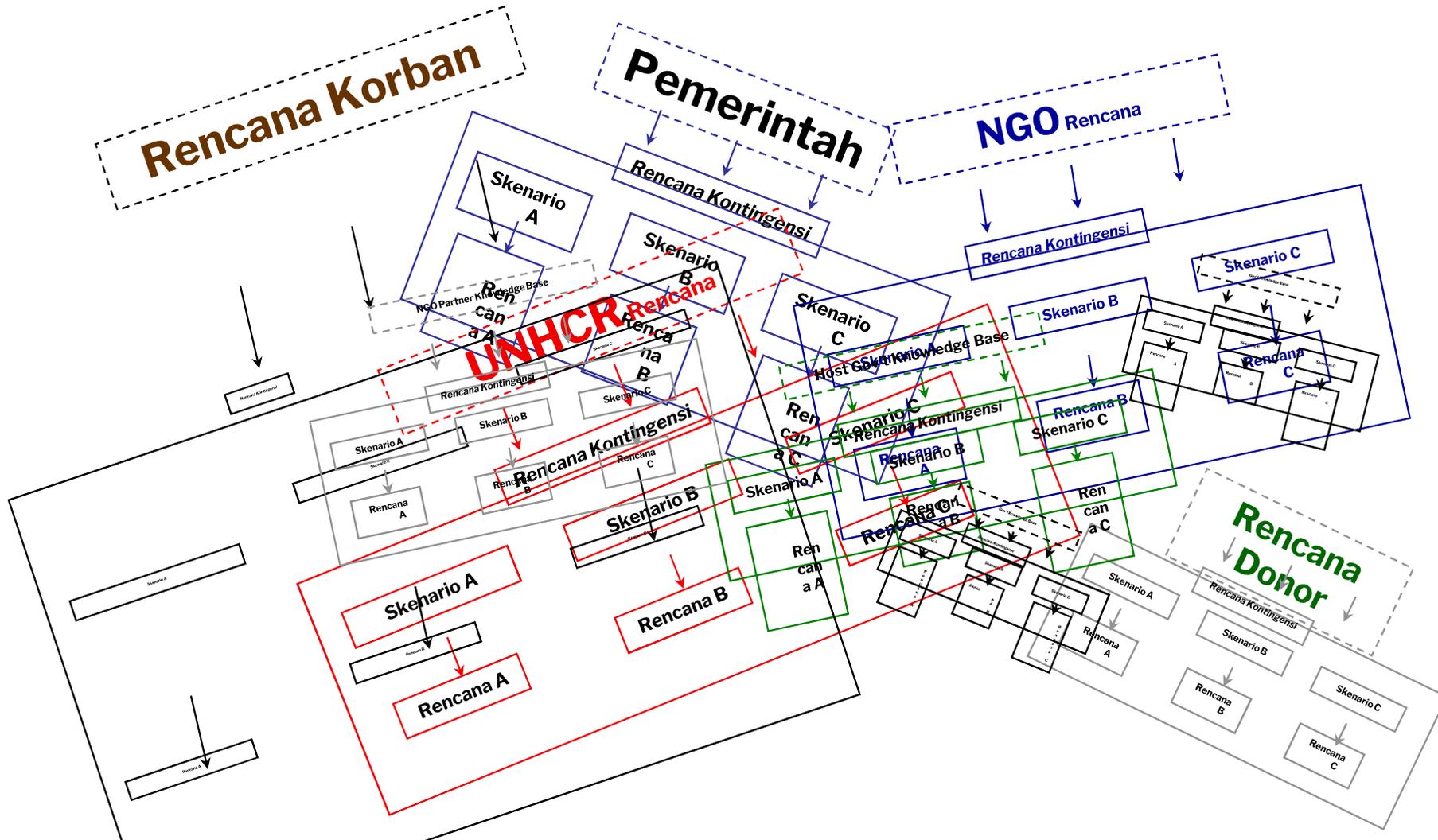
**07 RESMI**  
Perencanaan kontinjensi mempunyai dasar  
resmi dan hasilnya mendasari perencanaan dan  
penganggaran, perencanaan dan tindakan

**08 ACUAN KEDARURATAN**  
Hasil penyusunan mempunyai unsur yang  
memadai untuk dikonversi menjadi Rencana  
Operasi ketika sungguh terjadi kejadian  
bencana



# Proses Penyusunan

# Rencana Kontinjensi yang tidak terkordinasi



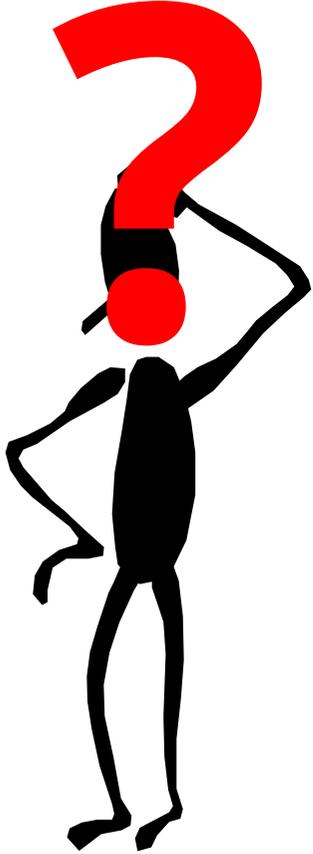
# Waktu Penyusunan

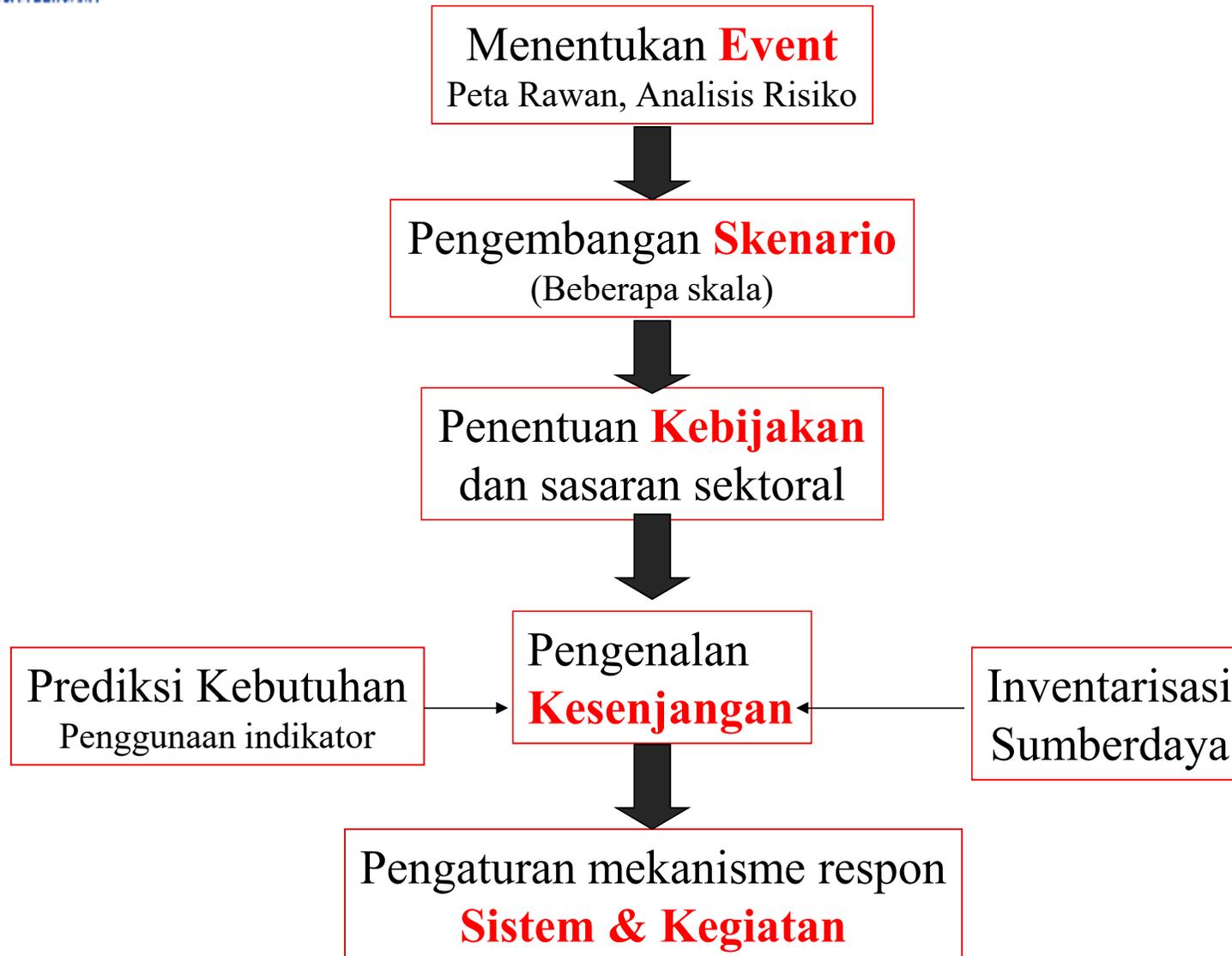
Jenis Bencana	Waktu Penyusunan	Sumber Peringatan Dini
Banjir	Pada awal musim penghujan atau ketika peringatan dini pergantian musim sudah dikeluarkan.	BMKG bidang Klimatologi, Kementerian PU
Banjir Bandang	Pada awal musim penghujan atau ketika peringatan dini pergantian musim sudah dikeluarkan.	Kementerian PU, PVMBG
Tanah Longsor	Pada awal musim penghujan atau ketika peringatan dini pergantian musim sudah dikeluarkan.	BMKG bidang Klimatologi, PVMBG
Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Pada awal musim kemarau atau ketika peringatan dini pergantian musim sudah dikeluarkan.	BMKG bidang Klimatologi, Kemenhut, Kemtan
Kekeringan	Pada awal musim kemarau atau ketika peringatan dini pergantian musim sudah dikeluarkan.	BMKG bidang Klimatologi, Kemtan
Letusan Gunung Api	Pada saat peringatan dini letusan gunung berapi mengeluarkan status Waspada atau Siaga.	PVMBG
<b>Gempabumi/ Gempabumi dan Tsunami</b>	<b>Dapat dimulai kapan saja di daerah berpotensi ancaman gempabumi dan tsunami berdasarkan hasil analisa para pakar gempabumi dan tsunami. Khusus untuk gempabumi dan tsunami, rencana kontinjensi tidak dapat dibuat ketika peringatan dini dikeluarkan karena sempitnya rentang waktu antara peringatan dan kejadian.</b>	<b>BMKG bidang Geofisika, PVMBG</b>
Kegagalan teknologi	Jika terdapat potensi ancaman kegagalan teknologi	BPPT, BAPETEN, Asosiasi Dunia Usaha Terkait
Pandemi	Pada saat di daerah tersebut terdapat potensi penyebaran penyakit tertentu.	Kementerian Kesehatan
Konflik sosial	Jika terdapat potensi ancaman konflik sosial	Pemerintah atau Pemerintah provinsi/kabupaten/kota





Rencana Kontingensi utk ancaman bencana yg mana?





### Prioritas Ancaman

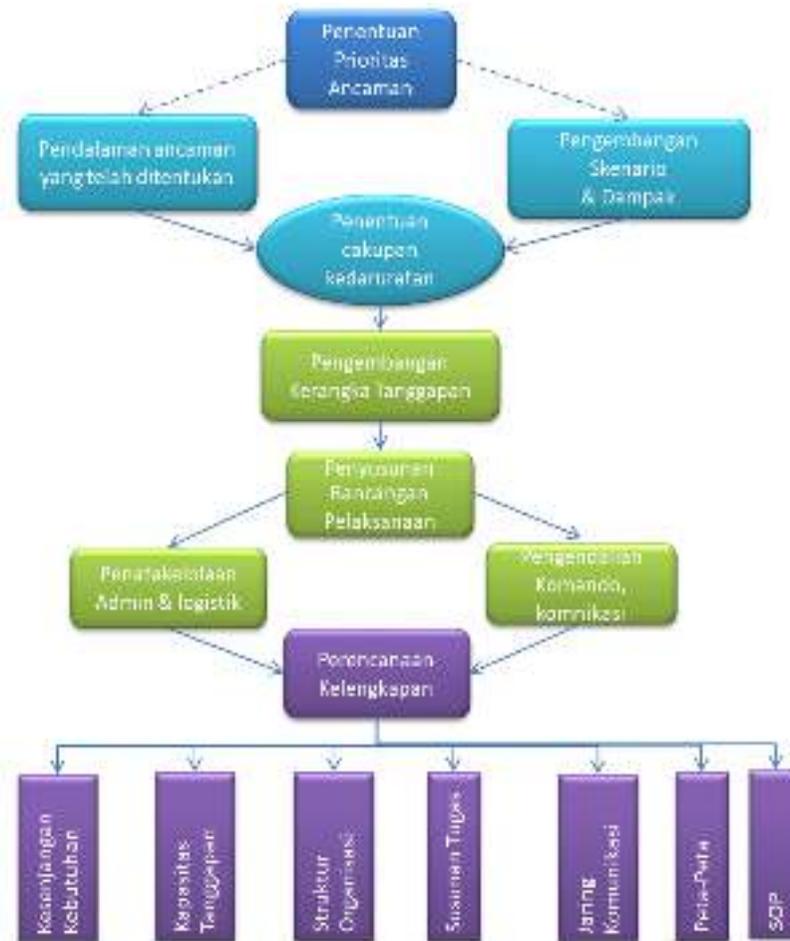
Idealnya sudah ditentukan di RPKB

### Penentuan cakupan kedaruratan:

Penentuan cakupan geografis, demografis dan intensitas kedaruratan. Dihasilkan dari karakteristik ancaman dan skenario kejadian dan dampak bencana

### Pengembangan Kerangka Tanggapan

Turunan dari kebijakan dalam RPKB untuk mengarahkan tanggapan, seperti Azas, prinsip, dan tujuan



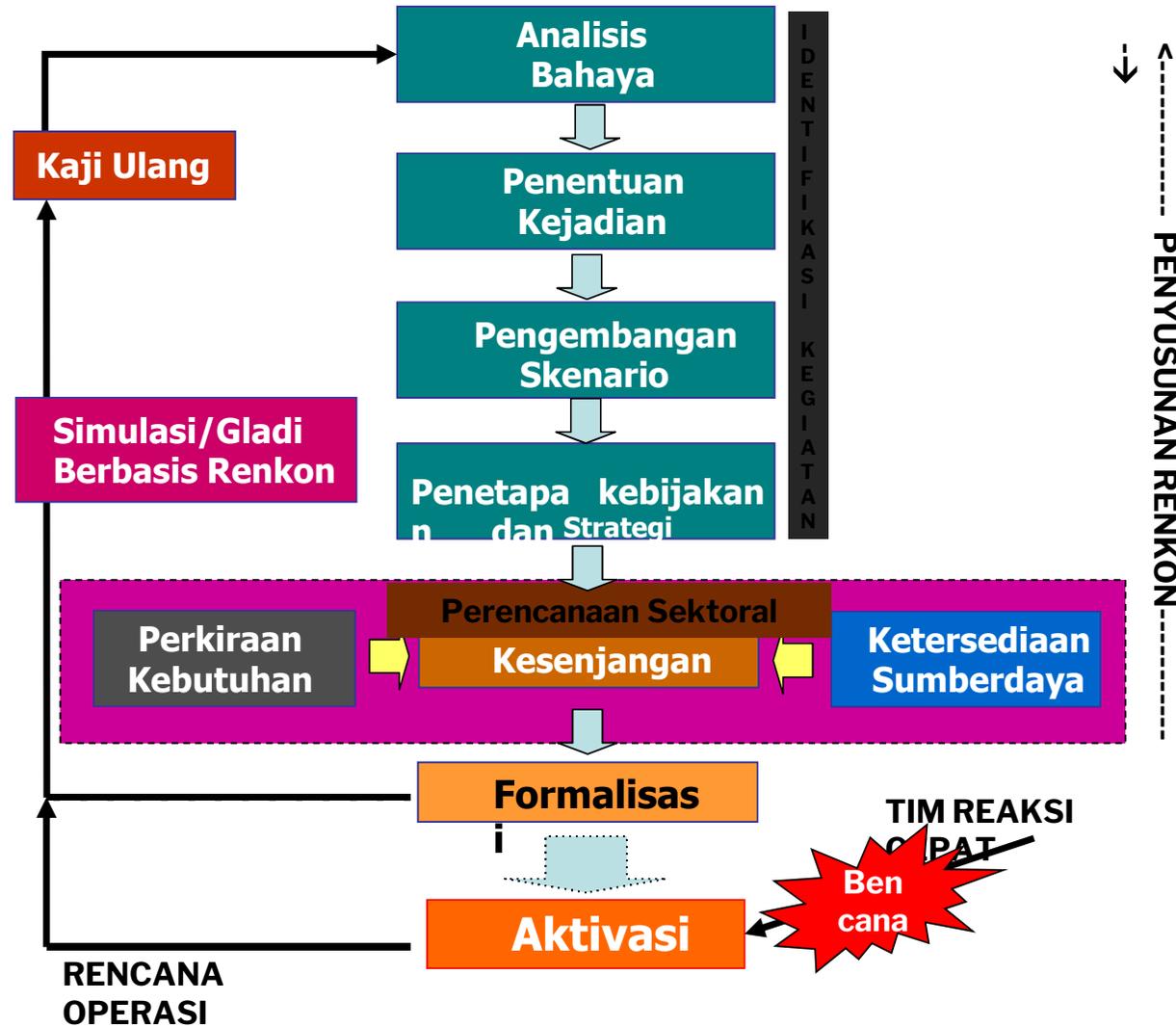
### Rancangan Tanggapan

Pengaturan dari "MESIN" yang akan menggerakkan dan mengendalikan jalannya operasi langkah demi langkah

### Kelengkapan

Informasi, perangkat dan bahan mentah yang akan berfungsi sebagai materi pasokan tenaga untuk menggerakkan operasi tanggap darurat. Termasuk didalamnya penerapan pendekatan Satgas/Klaster

# PROSES PERENCANAAN KONTINGENSI





# Peserta

Diharapkan peserta perencanaan kontinjensi memenuhi persyaratan berikut:



- ✓ memegang mandat/penugasan
- ✓ min. Eselon 4 / mid-manajer
- ✓ memahami dasar-dasar PB
- ✓ paham proses bisnis sektornya
- ✓ membawa / punya akses data
- ✓ komitmen tindak lanjut

## DUNIA USAHA

- PLN
- Telekomunikasi
- Pertamina
- Penerbangan (Bandara dan Pelabuhan)
- Perbankan
- Rumah Sakit
- Media Massa
- Pihak-pihak/para pelaku lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana

## PEMDA

- Kementerian/Lembaga terkait
- TNI dari Kodam/Kodim/Koramil
- POLRI dari Polda/Polres/Polsek
- OPD erkait di daerah

## MASYARAKAT SIPIL

- Palang Merah Indonesia (PMI)
- Kelompok Search and Rescue (SAR) dari masyarakat
- Relawan Penanggulangan Bencana (Tagana, Pramuka, Mapala, dan lain-lain)
- ORARI/RAPI
- LSM/NGO/Organisasi Masyarakat Sipil
- Perguruan Tinggi
- Tokoh masyarakat/agama/adat

# Tantangan Renkon Yang Lalu

Kerancuan antara PELATIHAN dan PENYUSUNAN renkon yang sebenarnya, sehingga berimplikasi pada proses dan produknya

Terlalu berat pada akurasi data ilmiah dan meninggalkan aspek praktis koordinasi dan proses tangga darurat itu sendiri.

## AKURASI



## POSISI



RENKON diposisikan sebagai produk dari pencegahan dan kesiapsiagaan, sedangkan tanggap darurat menggunakan kerangka kerja terpisah dan tidak memanfaatkan dokumen renkon

## PEMUTAKHIRAN



Dokumen RENKON dianggap sebagai produk akhir. Setelah penyusunan dan simulasi tidak pernah ditinjau kembali validitasnya

## DE (AKTIVASI)



Tidak ada mekanisme untuk menyatakan masa berlakunya Renkon, apakah  
1. dinyatakan tetap (dengan update),  
2. di de-aktivasi - untuk menjadi bagian RPKB ran RPB

# PENGUNAAN RENKON - TANGGAP DARURAT ?

1. SUBSTANSI PADA RENKON TIDAK MEMADAI UNTUK DIRUBAH MENJADI RENCANA OPERASI YANG HANDAL
2. PROSES RAPAT AWAL DI POSKO SANGAT CEPAT DAN MENDADAK, HANYA DOKUMEN YANG OPERASIONAL YANG CENDERUNG DIPAKAI
3. SATGAS DI POSKO LANGSUNG FOKUS KEPADA 6 (ENAM) KEGIATAN PENANGANAN DARURAT SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA PASAL 48 UU 24/2007 TTG PB.
4. TIDAK ADA MENJELASKAN TTG RENKON PADA SAAT RAPAT AWAL DI POSKO UTAMA
5. BELUM ADA PEMAHAMAN/ PERATURAN YANG MEWAJIBKAN DANDSATGAS BEKERJA MERUJUK AWAL KEPADA RENKON
6. SOSIALISASI INTENSIF TENTANG PENTINGNYA RENKON, SECARA INTENSIF
7. RENKON HANYA DIKENAL SEBAGAI PERSYARATAN ADMINISTRASI SAJA.
8. ....

# PELAJARAN: HAL-HAL PERLU PRAKTEK RENKON

1. Harus ada Denah / layout tampak atas Kawasan sesaat sesudah terjadinya bencana ( perlu foto udara dulu )
2. Tetapkan rencana lokasi shelter pengungsi, RS Darurat, Sekolah Darurat, Posko Utama , pendaratan Helicopter , Gudang logistik lapangan , lokasi pemakaman masal, melalui gambar Spacial Planing
3. Hitung prediksi jumlah penduduk yang akan terdampak
4. Hitung jumlah kebutuhan dasar yg dibutuhkan per hari.
5. Hitung dan prediksi kebutuhan sumber daya manusia untuk mengurus tanggap darurat , khususnya komponen utama ; TNI/Polri, relawan, tenaga medis, tenaga SAR dll.
6. Perkirakan kebutuhan peralatan2 khusus
  7. Perkirakan kebutuhan alat transportasi ; Truk, Helicopter, Hercules, kapal, alat berat Excavator
  8. Rancang Layout Posko Utama
  9. Rancang penginapan tenaga pekerja tanggap darurat
  10. Rancang kebutuhan logistic untuk pekerja tanggap darurat
  11. Rancang alternatif lokasi evakuasi keluar wilayah kabupaten terdampak
  12. Rancang dan tetapkan lokasi pengungsi dengan skema DTH ( Dana Tunggu Hunian )
  13. Rancang perkiraan kebutuhan anggaran selama pelaksanaan penanganan darurat bencana ( dengan beberapa alternatif )
  14. Perencanaan No 1 s/d 13 dengan 3 level alternatif situasi ( Situasi A, Situasi B,,Situasi C )
  15. ....



LEMBAGA NASIONAL  
PENANGGULANGAN  
BENCANA

**TERIMAKASIH**